

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KARANTINA PERTANIAN
BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I JAYAPURA**

Jl. OTONOM NO. 9 ABEPURA – KOTARAJA,
JAYAPURA – PAPUA 99221
Telepon (0967) 586658 Hunting; (0967) 581002
Faximili (0967) 584141
e-mail : bkpjpura@gmail.com

KATA PENGANTAR

Patut bersyukur pada Tuhan YME Agenda Kerja Strategis Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura telah diselesaikan. Agenda Kerja Strategis ini disusun mengacu pada Rencana Kerja Strategis Badan Karantina Pertanian dan Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2015 – 2019, dalam Kerangka Kabinet Kerja Presiden Ir. H. Joko Widodo dan Wakil Presiden Drs. H. Yusuf Kalla, sebagai cerminan Integritas visi dan misi Badan Karantina Pertanian.

Peningkatan kemampuan memproteksi dalam pengawasan komoditas pertanian yang dapat mengganggu Sumber Daya Hayati Nasional merupakan upaya mendukung untuk mencapai tujuan Nasional Kemandirian Pangan. Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura mendorong terwujudnya swasembada pertanian daerah dan mendorong terciptanya akselerasi tumbuhnya komoditas pertanian berorientasi ekspor dengan berbasis sumber daya lokal, dengan produk berdaya saing dan bermutu.

Agenda Kerja Strategis ini merupakan Acuan Kerja Balai Karantina Pertanian kelas I Jayapura dalam melakukan kegiatan, mari satukan langkah, bulatkan tekad, tingkatkan integritas menggapai kinerja terbaik.

Terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang telah diberikan oleh semua pihak.

Jayapura, 26 Juni 2015
Kepala Balai,

L. M. Mastari
Nip. 19620225 199903 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB. I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS, FUNGSI DAN PERAN	4
a. Tugas pokok dan fungsi	4
b. Peran Balai Karantina Pertanian	5
C. STRUKTUR ORGANISASI	10
D. PROFIL SUMBER DAYA	11
- Kondisi Umum Pegawai	11
E. SARANA PRASARANA	14
1. Tanah	15
2. Bangunan	16
3. Kendaraan Operasional	17
BAB. II VISI, MISI DAN MOTO	
A. VISI	18
B. MISI	19
C. MOTO	19
BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS	
A. IDENTIFIKASI MASALAH	21
1. Aspek Sumber Daya dan Tata Kelola Pemerintah	21
2. Aspek Operasional Pelayanan Karantina dan Pengawasan	23
B. ISU – ISU STRATEGIS	24
C. MASALAH/HAMBATAN YANG PERLU DIATASI	24
D. ANALISIS BEBAN OPERASIONAL	25
BAB. IV STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
A. RENCANA STRATEGI	26
BAB. V PROGRAM DAN KEGIATAN	
A. SASARAN	27
B. KEGIATAN DAN LANGKAH OPERASIONAL	28
BAB. VI INDIKATOR KINERJA	29
BAB. VII PENUTUP	43

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan Karantina Pertanian pada tahun 2015 merupakan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional -RPJMN 2015 – 2019, dan dalam mengambil peran pembangunan nasional Barantan dengan **Visi “Menjadi Instansi yang Tangguh dan Terpercaya Dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan dan Tumbuhan, Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati serta Keamanan Pangan”**. Untuk menggapai Visi Badan Karantina Pertanian diemban Misi sebagai berikut:

- 1) **Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari tumbuhan dari serangan hama dan penyakit hewan karantina (HPHK), dan Organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK)**
- 2) **Mendukung terwujudnya keamanan pangan**
- 3) **Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian**
- 4) **Memperkuat kemitraan perkarantinaan**
- 5) **Meningkatkan Citra dan Kualitas Layanan Publik .**

Telah terjadinya perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal seperti dampak krisis ekonomi global, terjadinya perubahan cuaca, terbentuknya kelompok-kelompok negara kerja sama ekonomi, berkembangnya kabupaten-kabupaten baru, isu bioterorisme dituntut peran karantina yang lebih dalam perlindungan ketahanan dan keamanan pangan , kelestarian lingkungan, akselerasi ekspor produk pertanian, juga disisi lain dituntut oleh masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dengan kualitasn pelayanan publik, mengharuskan kepada setiap unsur pegawai Karantina pertanian bekerja keras untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Menyadari peran dan tanggung jawab atas tuntutan dan pengakuan pemangku kepentingan, institusi karantina pertanian harus terus diperkuat menyelaraskan dengan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang teknologi, transportasi dan telekomunikasi.

Badan Karantina Pertanian ditetapkan sebagai instansi yang melaksanakan tugas perkarantinaan hewan dan tumbuhan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan agar tujuan perkarantinaan hewan dan tumbuhan tercapai sesuai dengan harapan maka Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura sebagai Unit pelaksana Teknis Badan Karantina Pertanian perlu menyusun dokumen Agenda Kerja Strategis jangka menengah (lima tahun) sebagai acuan kerja dalam mengimplementasikan cerminan Integritas terhadap visi dan misi Badan Karantina Pertanian.

I.2. Visi, Misi, Moto Janji Pelayanan, Budaya Kerja dan Value.

- Visi : Menjadikan Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura yang terbaik, tangguh, profesional dan terpercaya.
- Misi : - Melindungi kelestarian sumber daya alam hayati hewani dan tumbuhan nasional dan daerah;
- Mendukung keberhasilan program pengembangan agribisnis dan peningkatan ketahanan pangan nasional dan daerah;
- Memfasilitasi kelancaran perdagangan/pemasaran produk agribisnis;
- Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat;
- Mendorong partisipasi masyarakat di daerah dalam penyelenggaraan perkarantinaan.
- Moto : Bersama Karantina mari cegah dan lindungi tanah Papua dari penyakit hewan dan tumbuhan.
- Janji Pelayanan : Petugas Karantina tidak menerima gratifikasi dan pungutan liar diluar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- Nilai Budaya Kerja : 1. **Berpikir Cerdas**, selalu berupaya melakukan pilihan terbaik dalam melakukan tindakan.
2. **Amanah**, dalam menjalankan tugas merupakan ibadah, selalu ikhlas, tulus, totalitas dan profesional dalam

menjalankan dan bertanggungjawab dalam menggunakan sumber daya yang efektif dan efisien serta berkomitmen yang tinggi dalam memberi pelayanan.

3. **Inovatif**, mengembangkan cara-cara terbaik dalam mencapai tujuan dengan kreatif.
4. **Bekerjasama dan Komunikatif**, selalu melakukan komunikasi untuk memahami pelayanan yang dibutuhkan stake holder dan selalu bekerja sama baik internal maupun eksternal dalam mencapai tujuan.
5. **Scientif Base**, dalam bekerja selalu berdasarkan teknologi dan ilmu pengetahuan serta standar-standar baku yang telah ditetapkan.

Value BKP Jayapura:

1. Komitmen;
2. Disiplin;
3. Keteladanan;
4. Integritas;
5. Kesetiaan dan Penegakan aturan.

I.3. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tujuan

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 22/Permentan/OT.140/4/2008. Berkedudukan dan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

Kedudukan

Balai Karantina Pertanian kelas I Jayapura berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Pertanian.

Tugas Pokok

Melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta penguasaan keamanan hayatihewani dan nabati.

Fungsi

- a. Penyusun rencana, mengevaluasi dan membuat laporan.

- b. Pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK).
- c. Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK.
- d. Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK.
- e. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Hayati Hewani dan nabati.
- f. Pelaksanaan pemberian layanan operasional karantina hewan dan karantina tumbuhan
- g. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamananhayati hewani dan nabati.
- h. Pengelolaan sistem informasi, dokumentasi dan aran teknik karantina hewan dan tumbuhan.
- i. Pelaksanaan, pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati hewani dan nabati.
- j. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Tujuan

Menjaga masuk dan tersebarnya hama penyakit hewan menular dan organisme pengganggu tumbuhan berbahaya, baik dari luar negeri maupun antar area dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

I.4. Peran Balai Karantina Pertanian

1) Peran BKP Kelas I jayapura dalam Sistem Perlindungan.

Sesuai UU No.16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Karantina didefinisikan sebagai "tempat pengasingan dan atau tindakan" dalam rangka upaya pencegahan masuk dan menyebarnya hama dan penyakit untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam hayati hewan, ikan dan tumbuhan. Dalam rangka melaksanakan UU No.16 Tahun 1992 adalah perlunya menjaga kekayaan sumberdaya alam hayati dan dilindungi dari anacaman dan gangguan HPHK dan OPTK, acaman tesebut berdampak luas pada stabilitas ekonomi, keberhasilan usaha dan agribisnis bahkan isu bio terorisme, untuk itu salah satu

strategi dalam melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan adalah melalui ***"Penyelenggaraan Perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan"***.

Tujuan perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan oleh BKP Kelas I Jayapura adalah :

1. Menjaga masuknya hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia serta penyebarannya dari suatu area ke area yang lain didalam wilayah Negara Republik Indonesia;
2. Mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan karantina ke luar negeri; dan
3. Mencegah keluarnya organism pengganggu tumbuhan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri apabila di persyaratnya oleh Negara tujuan.

Walaupun karantina diartikan sebagai tempat dan tindakan, ruang lingkup pengaturan bidang perkarantinaan meliputi :

1. Persyaratan Karantina
2. Tindakan Karantina
3. Kawasan Karantina
4. Jenis jenis hama dan penyakit, Media Pembawa dan daerah sebarannya ; dan
5. Tempat tempat Pemasukan.

Ruang lingkup objek yang berkaitan dengan karantina berkaitan dengan orang, alat angkut dalam perhubungan, hewan dan produk hewan, tumbuhan dan produk tumbuhan, barang barang perdagangan lainnya yang dilalulintaskan, diletakkan pada prinsip bahwa segala sesuatu yang ditetapkan berdasarkan penilaian resiko dapat ditetapkan menjadi media pembawa hama dan penyakit hewan serta organism pengganggu tumbuhan

Perkarantinaan di selenggarakan berdasarkan asas **kelestarian sumberdaya alam** hayati hewan, ikan dan tumbuhan. Hal ini mengandung arti bahwa segala tindakan karantina yang dilakukan semata mata ditujukan untuk **melindungi kelestarian sumberdaya alam** hayati hewan, ikan dan tumbuhan **dari serangan hama dan penyakit** hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina organism pengganggu tumbuhan karantina, dan tidak perlu untuk tujuan tujuan lainnya.

Pada saat ini ancaman yang dapat mengganggu kelestarian sumberdaya alam, ketentraman dan kesehatan masyarakat, kesehatan pangan, gangguan terhadap produksi sektor Pertanian/Perikanan dan Kehutanan, serta lingkungan telah didefinisikan sebagai ancaman yang perlu untuk dicegah masuknya dan menyebar.

Ancaman yang secara global telah diidentifikasi dapat dikendalikan secara efektif melalui penyelenggaraan perkarantinaan antara lain:

- 1) Ancaman terhadap kesehatan Hewan dan Tumbuhan;
- 2) Invasive Species;
- 3) Penyakit Zoonosis;
- 4) Bioterrorism;
- 5) Pangan yang tidak sehat termasuk GMO yang belum dapat diidentifikasi keamannya;
- 6) Kelestarian Plasma nutfah/keanekaragaman hayati;
- 7) Kelestarian lingkungan;
- 8) Hambatan teknis perdagangan, dan
- 9) Ancaman terhadap kestabilan perekonomian Nasional.

Ancaman-ancaman tersebut dapat dikelola dengan baik agar tidak masuk dan menyebar kedalam negeri termasuk di Tanah Papua melalui kegiatan **pemeriksaan dan sertifikasi karantina**.

2) Peran Karantina Dalam Perdagangan Internasional.

Perdagangan internasional di atur oleh organisasi perdagangan dunia yang disebut World Trade Organization – WTO, dalam implementasinya organisasi tersebut menerbitkan berbagai perjanjian

yang berkaitan dengan pengaturan dan prosedur dibidang perdagangan internasional. Beberapa perjanjian yang telah diterbitkan antara lain yaitu :

- General Agreement on Tariffs and Trade
- Agreement on Trade Related Aspectas of Intelectual Property Ringts (TRIPS);
- Agreement on Aplication of Sanitary and Phytosanitary Measure (SPS)

SPS- Agreement atau perjanjian SPS diberlakukan untuk mengatur tatacara perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan serta lingkungan hidupnya dalam hubungannya dengan perdangangan internasional. Kesepakatan SPS berlaku dan mengikat secara global seluruh Negara yang menjadi anggotanya.

Negara Indonesia merupakan sala satu Negara anggota WTO, yang telah menyepakati piagam berdirinya organisasi tersebut dan diratifikasi melalui Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994. Oleh kerena itu Negara Indonesia berkewajiban memenuhi kesepakatan Internasional tersebut. Dasar hokum penyelenggaraan karantina hewan, ikan dan tumbuhan yaitu Undang Undang Nomor 16 Tahun 1992 dalam uraian penjelasanya telah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan perkarantinaan merupakan wujud dari pelaksanaan kewajiban internasional.

Sesuai dengan implementasi perjanjian SPS dalam perdagang internasional maka peran Barantan adalah :

- 1) Mengoperasionalkan persyaratan teknis (persyaratan karantina) impor yang telah ditetapkan ditempat pemasukkan dalam upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan ;
- 2) Memfasilitasi ekspor komoditas pertanian melalui pemeriksaan, audit, verivikasi dan sertifikasi karantina ekspor agar persyaratan teknis ditentukan Negara pengimpor dapat terpenuhi;

- 3) Turut serta memferifikasi persyaratan teknis Negara tujuan ekspor agar tetap dalam koridor perjanjian;
- 4) Barantan ditetapkan sebagai “Notification Body” dan ‘National Enquiry Poit’ SPS, peran tersebut merupakan sala satu bentuk dari komonikasi peryaratan teknis (dengan organisasi internasional dan Negara mitra) yang akan diberlakukan.

Pada saat ini ancaman yang dapat mengganggu kelestarian sumberdaya alam, ketentraman dan kesehatan masyarakat, kesehatan pangan, gangguan terhadap produksi sektor Pertanian/Perikanan dan Kehutanan, serta lingkungan telah didefinisikan sebagai ancaman yang perlu untuk dicegah masuknya dan menyebar.

Ancaman-ancaman tersebut dapat dikelola dengan baik agar tidak masuk dan menyebar kedalam wilayah Jayapura provinsi papua melalui kegiatan ***pemeriksaan dan sertifikasi karantina***.

Proses pemeriksaan dan sertifikasi kesehatan oleh karantina dimaksudkan pula untuk mendorong daya saing komoditas pertanian kita baik internasional maupun domestik. Selain itu mencegah masuk nya penyakit kedalam provinsi papua khususnya penyakit strategis dan masih bebas di Provinsi Papua seperti Rabies, Anthrax, Avian Tuberculosis, Septcemia Epizotik, leptospirosis.

BAB II

PROFIL SUMBERDAYA

II. 1. Kondisi Umum Kepegawaian

Dengan adanya Reorganisasi Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Karantina Pertanian sesuai Peraturan Menteri Pertanian No. 22/Permentan/OT.140/4/2008, kondisi kepegawaian BKP Kelas I Jayapura Tahun 2015 seluruhnya berjumlah 35 orang.

Jumlah SDM yang ada dibagi di seluruh wilker lingkup BKP Kls I Jayapura sebanyak 18 Orang di wilker dan 17 orang di Kantor BKP, dengan komposisi sebagai berikut.

Data SDM yang ada pada BKP kelas I Jayapura mulai dari Tahun 2010 s/d 2015.

No.	Jumlah Pegawai	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	- PNS	33	34	33	33	35	35
	- Struktural	5	5	5	5	5	5
	- Medik Vet & Paramedik Vet	15	13	13	9	13	13
	- POPT	7	7	6	6	8	8
	- Administrasi	6	6	9	9	9	9
	- THL	12	10	12	12	12	14

**DATA PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN
BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I JAYAPURA
TAHUN 2015**

NO	GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	IV	2	-	2
2	III	17	9	26
3	II	5	3	8
	TOTAL	24	12	36

**DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN
BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I JAYAPURA
TAHUN 2015**

NO	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	S2	5	4	9
2	S1	7	4	11
3	D3	3	1	4
4	SMA	9	3	12
	TOTAL	24	12	36

II. 2. Sarana Prasarana.

Sarana Prasarana yang tersedia pada BKP Kelas I Jayapura

No.	Sarana Prasarana	2010	2011	2012	2013	2014
1.	- Gedung Kantor	-	-	7	7	8
	- Tanah	-	-	6	6	7
	- IKH/IKT	-	-	-	-	1
	- R.4	4	6	6	6	6
	- R.2	19	19	19	20	20
	- Rumah Jaga	-	1	1	1	1

BAB. III

PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS

III.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN.

Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura Provinsi Papua dengan luas kawasan yang diawasi seluas kurang lebih luas darat 88.553.074 km² (menurut BPS Propinsi Papua), dengan jumlah Wilayah Kerja sejumlah 5 wilayah Kerja yaitu Wilker Karantina Pertanian Bandara Sentani, Pelabuhan Laut Jayapura, perbatasan Negara RI-PNG Skouw, Bandar Udara Wamena dan Kantor Pos besar Jayapura. dan banyak terdapat daerah perifer pemasukan/pengeluaran yang terbentang di sepanjang pantai Propinsi Papua yang perlu diawasi secara optimal.

Hama dan Penyakit Hewan serta organisme pengganggu tumbuhan yang telah ada di Propinsi Papua adalah Avian Influenza (AI), Scabies. *Liberobacter asiaticum* pada jeruk, *Bactrocera papayae*, *B. Umbrocos*, *B. Albistrigata*, *B. Cucurbitae*, *B. Dorsalis Complex* dan *Dacus Longicornis* pada buah dan sayuran.

Hama dan Penyakit Hewan serta organisme pengganggu tumbuhan yang belum ada di Propinsi Papua adalah Rabies, Hog cholera untuk beberapa Kabupaten dan Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya menuju pembebasan Avian Influenza (AI) dan Brucellosis, *Burkholderia glumae* dan *Paraeucosmetus Pallicornis* (hama kepik hitam) pada padi dan Bakteri *Pantoea Stewewartii* pada Jagung.

Tingkat Jabatan fungsional belum cukup berkontribusi dengan baik keseluruhan wilker. Serta sarana prasarana yang belum memadai.

III. 2. Aspek Sumber Daya dan Tata Kelola Pemerintah

Sehubungan dengan gambaran umum identifikasi permasalahan tersebut, ketersediaan sumber daya manusia (SDM) di Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura selaku pelaksana tugas pengamanan wilayah Propinsi Papua di pintu-pintu masuk/keluar secara kuantitas masih belum memenuhi standar.

Sedangkan secara kualitas perlu dilakukan inhouse training/ pelatihan-pelatihan baik teknis maupun administratif guna meningkatkan sistem pelayanan yang Prima, memiliki kompetensi dan berdaya saing.

Kebutuhan SDM tenaga teknis karantina tumbuhan dan karantina hewan pada masing-masing Wilayah Kerja Karantina Pertanian lingkup BKP Kelas I jayapura .

No.	Wilker	Jabatan Fungsional	Jumlah			Keterangan
			Kebutuhan	Realisasi	Selisih	
1.	Balai Karantina Pertanian Kelas I jayapura (Laboratorium)	Medik Veteriner	3 orang	1 orang (Calon MV) 1 orang MV	1 orang	Termasuk Pj Lab dan tenaga Administrasi, termasuk korfum
		Paramedik Veteriner	3 orang	2 orang	1 orang	
		POPT	4 orang	1 orang	3 orang	Diharapkan tenaga POPT ahli/terampil, termasuk korfum
2.	Wilker Bandara Sentani	Medik Veteriner	3 orang	1 orang	2 Orang	Termasuk Pj Wilker dan tenaga Administrasi
		Paramedik Veteriner	6 orang	2 orang	4 orang	
		Tenaga Teknis	1 orang	0	1 orang	
		POPT	3 orang	2 orang	1 orang	Diharapkan tenaga POPT ahli/terampil
3.	Wilker Perbatasan Negara Skouw	Medik Veteriner	1 orang	0	1 orang	Termasuk Pj Wilker dan tenaga Administrasi
		Paramedik Veteriner	3 orang	1 orang	2 orang	
		Tenaga Teknis	1 orang	0	1 orang	
		POPT	2 orang	1 orang	1 orang	Diharapkan tenaga POPT ahli/terampil
	Wilker Bandara	Medik Veteriner	1 orang	0	1	Termasuk Pj Wilker dan

4.	Wamena	Paramedik Veteriner	2 orang	0 orang	2 orang	tenaga Administrasi
		Tenaga Teknis	1 orang	1 orang	0 orang	
		POPT	2 orang	0 orang	2 orang	Diharapkan tenaga POPT ahli/terampil
5.	Wilker Kantor Pos besar Jayapura	Medik Veteriner	1 orang	0 orang	2 orang	Termasuk Pj Wilker dan tenaga Administrasi
		Paramedik Veteriner	2 orang	0 orang .	2 orang	
		Tenaga Teknis	1 orang	0	1 orang	
		POPT	2 orang	0 orang	2 orang	Diharapkan tenaga POPT ahli/terampil
Total			42 orang	13 orang	29 orang	

Sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan tindak karantina hewan di masing-masing wilker belum memadai antara lain; belum terdapat laboratorium mini untuk pemeriksaan laboratorium secara sederhana, alat transportasi mobil tahanan, Informasi Teknologi, instalasi karantina hewan dan tumbuhan beserta perlengkapannya dan Baju antipeluru untuk diperbatasan.

III.3 Aspek Operasional Pelayanan Karantina dan Pengawasan

Secara operasional pelayanan karantina , Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura membawahi 5 (lima) Wilayah Kerja yaitu Wilker Karantina Pertanian Bandara Sentani, Pelabuhan Laut Jayapura, perbatasan Negara RI-PNG Skouw, Bandar Udara Wamena dan Kantor Pos besar Jayapura. Jenis komoditas yang dilalulintaskan melalui masing-masing wilker bervariasi baik hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan, tumbuhan dan bahan asal tumbuhan yang mobilisasinya cukup tinggi. Secara risk analisis kelima wilker ini sangat berpeluang sebagai tempat masuk/keluarnya OPTK / HPHK seperti *Liberobacter asiaticum*, *Burkholderia glumae*, Avian Influenza (AI), Rabies, Brucellosis, Hog Cholera dan bahkan penyakit-penyakit berbahaya lainnya.

Secara topografi wilayah Propinsi Papua banyak terdapat perifer-perifer pelabuhan alami yang terbentang disepanjang pantai utara dan selatan yang sangat strategis dan merupakan tempat masuk/keluarnya media pembawa dari dan menuju Propinsi Papua, oleh karenanya perlu dilaksanakan pengawasan secara optimal, mengikuti prosedur tetap (Protap) dengan berpedoman ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Secara administrasi perencanaan, pelaksanaan anggaran, pengendalian dan evaluasi kinerja belum dilaksanakan secara efektif oleh karena belum maksimalnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura yang disebabkan belum optimalnya kinerja pegawai. Dengan demikian kebutuhan SDM dan sarana prasarana pendukung mutlak dibutuhkan demi terlaksananya pengawasan secara optimal.

III.4. ISU – ISU STRATEGIS

Diprovinsi Papua yang berbatasan dengan beberapa Negara yaitu Autralia, Papua Newginea, filipina dan Republik Palau, juga topografi yang bervariasi dan mempunyai garis pantai panjang dan terbuka serta garis perbatasan Negara yang panjang membentang dari utara keselatan maka terdapat beberapa isu strategis yaitu:

1. Ancaman pemasukan media pembawa HPHK/OPTK ilegal yang berpotensi tidak bebas penyakit & dapat menyebarkan penyakit.
2. Diberlakukannya pasar MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) tahun 2016.
3. Masalah masih ada masuknya komoditi pertanian yang tidak ASUH di Propinsi Papua.
4. Mempertahankan bebas Rabies di tanah papua.
5. Ancaman Lingkungan & Kelestarian Sumber Daya Hayati.
6. Rencana pemerintah melalui penguatan anggaran dalam menunjang kesejahteraan pegawai melalui kenaikan tunjangan kerja, maka perlu dilakukan penguatan sistim, peningkatan disiplin kerja serta penguatan administrasi dan teknis.

7. Rencana Pemerintah untuk membebaskan AI dan Brucellosis Tahun 2017 di Papua.

A. MASALAH / HAMBATAN YANG PERLU DIATASI :

1. Pengawasan pintu-pintu utama lalu lintas komoditas pertanian di Papua dan dibukanya Bandara Wamena sebagai bandara Nasional.
2. Pemeriksaan masih bertumpu pada pemeriksaan dokumen.
3. Tidak adanya instalasi produk hewan dan kurangnya perlakuan menyebabkan timbulnya isue seakan akan petugas karantina adalah pelaksana pemungut retribusi.
4. Masih ada pelanggaran, masuknya media pembawa yang ilegal, yang tidak dilengkapi dokumen dari daerah asal.
5. Adanya laporan bahwa Karantina menghambat perdagangan, lambatnya pemeriksaan sehingga menimbulkan biaya tinggi.
6. Masih adanya legislatif, eksekutif dan masyarakat yang belum mengenal, memahami tugas karantina pertanian.
7. Kurangnya SDM dan kompetensi SDM Karantina.
8. Sarana Prasarana kerja yang belum memadai.

Maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi hambatan dan tantangan , untuk kinerja yang efektif efisien.

B. ANALISIS BEBAN OPERASIONAL.

Balai karantina Pertanian Kelas I jayapura mempunyai beberapa wilayah kerja berbatasan dengan negara tetangga Papua New Genue, banyaknya daerah perifer pemasukkan/pengeluaran yang terbentang disepanjang pantai utara dan selatan sehingga luasnya kawasan yang perlu diawasi dengan rentang kendali yang jauh.

Ada 8 Kabupaten kota di pegunungan yang pintu masuk dan keluarnya melalui bandara Sentani, pelabuhan laut jayapura dan kantor pos sehingga perlu mengoptimalkan pengawasan dengan memberdayakan SDM yang ada dan prasarana kerja yang ada.

BAB. IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. KEBIJAKAN BKP KELAS I JAYAPURA. RENCANA KERJA STRATEGIS

BKP KELAS I Jayapura.

Sehubungan dengan gambaran umum, topografi, isu-isu strategis, sarana prasarana yang tersedia serta Identifikasi masalah yang ada maka Balai Karantina Pertanian kelas I Jayapura akan melakukan Sub Program Kerja Strategis dan Kebijakan lokal sebagai berikut :

- **Kebijakan Umum BKP kelas I Jayapura :**

1. Mendukung kebijakan Kementerian Pertanian dan Renstra Badan Karantina Pertanian;
2. Penguatan operasional perkarantinaan dalam rangka mendukung pencanangan swasembada pangan dan peningkatan produksi komoditas strategis;
3. Penguatan Sistem dan Laboratorium;
4. Penguatan data, informasi dan pengarsipan (IT) serta tatalaksana;
5. Penguatan SDM dan sarana prasarana.

B. STRATEGI MENCAPAI KINERJA OPTIMAL.

Untuk mencapai hasil kinerja yang optimal maka perlu disusun langkah-langkah strategi yaitu:

1. Penguatan kualitas pelayanan Perkarantinaan, Penguatan Operasional Pengawasan & Tindak Karantina Pertanian serta Pengawasan Keamanan Hayati.
2. Penguatan Koordinasi, Kerjasama & Harmonisasi Kerja serta publik awareness..
3. Penguatan kualitas SOP, Mekanisme kerja dan Sistem Perkarantinaan.
4. Penguatan Informasi teknologi (IT).
5. Penguatan laboratorium.
6. Penguatan Infrastruktur dan sarana kerja.
7. Penguatan kualitas dan kuantitas SDM.
8. Penegakan Aturan Perundang-undangan.
9. Penguatan Ketata usahaan & Administrasi Keuangan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB. V

PROGRAM DAN KEGIATAN

Mengacu pada Renstra Kementerian Pertanian & Renstra Badan Karantina Pertanian tahun 2015 – 2019, Balai Karantina Pertanian kelas I Jayapura menetapkan program yaitu : “ **Program Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian & Pengawasan Keamanan Hayati**”.

- Sub Program Kerja Strategis BKP Kelas I Jayapura :

A. SASARAN OUTPUT :

Sasaran kinerja BKP kelas I Jayapura periode 2015-2019 yaitu:

1. Peningkatan efektifitas pelayanan, kualitas dan kuantitas operasional tindakan karantina serta pengawasan keamanan hayati.
2. Meningkatnya efektifitas Public Awareness, kualitas pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan harmonisasi kerja dengan instansi terkait dan UPT asal atau tujuan.
3. Meningkatnya pelayanan perkarantinaan.
4. Peningkatan kualitas sistem informasi, data, kearsipan dan pelaporan dalam pelayanan informasi karantina.
5. Peningkatan indeks kesesuaian operasional tindakan karantina dan pengawasan terhadap kebijakan, prosedur, standar, teknik dan metoda yang dilaksanakan.
6. Peningkatan sarana prasarana dan alat kerja.
7. Meningkatkan kualitas, kompetensi, disiplin dan mental SDM Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura.
8. Meningkatnya kepatuhan serta indeks kepuasan pengguna jasa karantina pertanian.
9. Meningkatnya kualitas management kinerja dengan mengimplementasikan perencanaan budgeting dan pengawasan (SPI serta wasdak) dan penatausahaan rumah tangga.

B. KEGIATAN DAN LANGKAH OPERASIONAL :

- 1.) Peningkatan efektifitas pelayanan, kualitas dan kuantitas operasional tindakan karantina serta pengawasan keamanan hayati.
 - a. Peningkatan pengawasan dan tindak karantina di pintu utama masuk / keluar di Papua :
 - Verifikasi
 - Risk assesment
 - b. Peningkatan pengawasan terhadap HPR, HPAI dan brucellosis di Propinsi papua.
 - Verifikasi
 - Sampel pemeriksaan
 - Risk assesment
 - c. Pemantauan penyebaran HPHK / OPTK di Papua:
 - Data sekunder
 - Hasil pemeriksaan sampel
 - Data Primer
 - d. Tindakan Karantina diluar tempat pemasukan / pengeluaran atau instalasi karantina.
 - Pre-shipment inspection.
 - Post shipment inspection.
 - e. Pengambilan sample / deteksi dini media pembawa HPHK / OPTK dan pengawasan keamanan hayati .
 - Pemeriksaan sampel
 - f. Koleksi HPHK / OPTK terhadap HPHK / OPTK yang telah ada (endemik di Papua).
 - Pengawetan sampel media pembawa.
 - g. Pemetaan penyakit HPHK / OPTK di wilayah Provinsi Papua.
 - Data primer
 - Data sekunder
 - h. Peningkatan pengawasan terhadap pakan, bibit sapi, benih padi jagung kedelai.
 - Verifikasi
 - Pre & post-shipment Inspeksi
 - Risk assesment
 - i. pengawasan keamanan pangan/daging ayam beku, telur, daging dan buah.
 - j. Melaksanakan koordinasi dengan Korwas PPNS POLDA Papua.
- 2.) Meningkatkan efektifitas Public Awareness, kualitas pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan harmonisasi kerja dengan instansi terkait dan UPT asal atau tujuan.
 - a. Melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dalam pengawasan penyebaran penyakit dan pembentukan Tim Kesiap siagaan Dini,

pengendalian dan Penanganan Bencana Penyakit Hewan Menular & Zoonosis Daerah.

- b. Melakukan koordinasi dan harmonisasi kerja dengan pemerintah daerah dalam pengawasan penyebaran penyakit dan tindakan karantina.
- c. Membentuk Tim Koordinasi Perkarantinaan Instansi terkait.
- d. Membentuk tim koordinasi dan pertukaran informasi intelegen.
- e. Mewujudkan pelaksanaan pengawasan tindakan karantina media pembawa pada kantor pos & pengelola jasa titipan.
- f. Melaksanakan koordinasi dan harmonisasi kerja dengan UPT asal / tujuan komoditas media pembawa penyakit / organisme pengganggu.
- g. Sosialisasi pada media masa dan instansi terkait.

3.) Meningkatkan pelayanan perkarantinaan.

- a. Menyusun rencana kegiatan yang disinkronkan dengan penganggaran (ROPAK).
 - Analisa kebutuhan
 - Pengumpulan data
 - Pengolahan data
 - Renja, jadwal palang.
- b. Membuat Alur Pelayanan dan sistim kerja Balai Karantina Pertanian kelas I jayapura.
- c. Menyusun cara kerja alat laboratorium dan mekanisme pemeriksaan laboratorium.
- d. Menyusun Standar Operating Precedure (SOP) Pengawasan dan Tindakan Karantina Pertanian.
- e. Membentuk Wilker dengan sistem Pelayanan Cepat (Quick Win).
- f. Pengembangan sistem management mutu pelayanan.

4) Peningkatan kualitas sistem informasi, data, kearsipan dan pelaporan dalam pelayanan informasi karantina.

- a. Mensinkronkan SIKAWAN & E-PLAQ di Wilker, Balai dan Pusat Karantina Pertanian.
- b. Mengoptimalkan sistem SIKAWAN & E-PLAQ sehingga on time.
- c. Membuat buku kompilasi peraturan perundang-undangan karantina pertanian dengan membagi pengelompokan buku (Undang-undang yang berkaitan dengan karantina, Perpres, Peraturan Pemerintah, Permentan, Kumpulan Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian, Surat Edaran & Peraturan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Perkarantinaan).
- d. Membuat brosur, leaflet, neon box tentang himbauan, aturan, mekanisme

- yang berkaitan dengan informasi perkarantinaan.
- e. Melaksanakan Sosialisasi pada pelaku kegiatan lalu lintas barang terkait Perkarantinaan, legislatif dan eksekutif serta para pelajar/ mahasiswa.
 - f. Membuat buku dokumentasi dan data.
 - g. Mengonlinekan antara Wilker dan UPT.
 - h. Iklan dan penulisan di media cetak dan elektronik.
- 5) Peningkatan indeks kesesuaian operasional tindakan karantina dan pengawasan terhadap kebijakan, prosedur, standar, teknik dan metoda yang dilaksanakan.
- a.. Membentuk tim SPI dan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal (SPI).
 - Evaluasi
 - Pengawasan
 - Pemeriksaan data kinerja.
 - b. Membentuk tim verifikator dokumen dan kegiatan.
 - c. Membuat SOP Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Perkarantinaan.
 - d. Membentuk tim koordinasi penyelesaian perkara tindak karantina pertanian.
- 6) Peningkatan sarana prasarana dan alat kerja.
- a. Menyusun dan melaksanakan pengadaan kebutuhan dasar kerja Balai Karantina Pertanian kelas I Jayapura.
 - b. Mengadakan pengadaan alat dan bahan Laboratorium sehingga menunjang peneguhan diagnosa untuk pengambilan keputusan.
 - c. Pelaksanaan jejaring kerja laboratorium pada laboratorium yang ada di Papua dan Sulawesi selatan.
 - d. Pembangunan Instalasi Karantina Pertanian terpadu (instalasi Produk hewan, instalasi hewan kesayangan, HPR, Unggas dan Ruminansia).
 - e. Kelengkapan IT dan alat komunikasi.
- 7) Meningkatkan kualitas, kompetensi, disiplin dan mental SDM Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura.
- a. Mengikutsertakan SDM Balai Karantina Pertanian kelas I Jayapura pada pendidikan & pelatihan yang diadakan Badan Karantina Pertanian dan atau Eselon I lainnya di lingkup Kementerian Pertanian.
 - b. Mengikutsertakan SDM Balai Karantina Pertanian kelas I Jayapura pada Pendidikan dan Pelatihan yang diadakan BBUSKP, Balai Besar dalam lingkup Badan Karantina Pertanian.
 - c. Diskusi kelompok hasil kegiatan tindak karantina, pemantauan dan hasil pemeriksaan sample.
 - d. Presentasi umum hasil keikutsertaan pada Pendidikan dan Pelatihan

- kepada seluruh pegawai Balai Karantina Pertanian kelas I Jayapura.
- e. Pelaksanaan peningkatan pembinaan akhlak spiritual secara kontinue dan berkesinambungan di Balai Karantina Pertanian kelas I Jayapura.
 - f. Pelaksanaan Motivasi pegawai dan Outbond.
- 8) Meningkatnya kepatuhan serta indeks kepuasan pengguna jasa karantina pertanian.
- a. Sosialisasi terus menerus secara kontinue.
 - b. Peningkatan pelayanan dg membentuk tim SPP.
 - c. Mengawasan lapangan dg bekerja sama korwas POLDA Papua.
- 9) Meningkatnya kualitas management kinerja dengan mengimplementasikan perencanaan budgeting dan pengawasan (SPI serta wasdak) dan penatausahaan rumah tangga.
- a. Membuat alur tata surat dan kearsipan.
 - b. Menyusun alur keuangan dan administrasi keuangan.
 - c. Membuat TOR (Term of Reference) setiap kegiatan untuk penilaian azas manfaat di Balai Karantina Pertanian kelas I Jayapura.
 - d. Membuat alur (sistem) pengadaan barang/pengusulan kegiatan sehingga terkoordinasi, akuntabel dan transparan sebagai wujud pengawasan internal dan pelaksanaan Perpres nomor 54 tahun 2010.
 - e. Membentuk tim SPI dan verifikator.

C. KEGIATAN PRIORITAS :

Dari 9 (sembilan) Sasaran kinerja tersebut diatas, ada 7 (Tujuh) Penguatan prioritas dalam mendukung program kegiatan BKP kelas I Jayapura periode 2015-2019 yaitu:

1. Penguatan kualitas pelayanan dan Operasi Perkarantinaaan dalam mendukung pencapaian swasembada pangan dan mensinergikan kebijakan pembangunan daerah;
2. Penguatan koordinasi, kerja sama dan harmonisasi kerja serta publik awareness;
3. Penguatan Informasi teknologi;
4. Penguatan laboratorium;
5. Penguatan sarana dan prasarana kerja;
6. Penguatan SDM;
7. Penguatan Ketatausahaan dalam mendukung tatakelola pemerintahan yang baik.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA

Vi.1. Indikator Kinerja Teknis:

- Indikator Kinerja Utama Program:
 - a. Efektifitas Pengendalian Resiko masuk dan menyebarnya HPHK/OPTK, serta pangan yang tidak sesuai Standar Keamanan Pangan.
 - b. Efektifitas pelayanan ekspor komoditas pertanian dan produk tertentu.
 - c. Tingkat kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina pertanian.

Kegiatan: Peningkatan kualitas pelayanan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati.

- Indikator Kinerja Kegiatan:
 - a. Layanan sertifikasi karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati.
 - b. Tingkat kesesuaian pelayanan terhadap kebijakan, standar dan metoda pelayanan yang diberlakukan
 - c. Penilakan kiriman barang ekspor yang disertifikasi karantina pertanian.
 - d. Peningkatan indeks kepuasan dan kepatuhan pengguna jasa.

Indikator Kinerja Manajemen/Ketatausahaan:

- Indikator kinerja kegiatan:
 - a. Efektifitas pelayanan publik;
 - b. Dukungan manajemen;
 - c. Tingkat kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina pertanian.

BAB VII

PENUTUP

Peran Karantina Pertanian dalam menunjang pembangunan sub sektor pertanian di propinsi Papua sebagai upaya perlindungan sumber daya alam hayati hewani dan nabati memberikan dampak yang signifikan. Untuk itu perlu adanya upaya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta koordinasi antar instansi terkait dan juga upaya peningkatan pemahaman masyarakat melalui kegiatan kegiatan yang dapat menyentuh hati masyarakat.

Dalam kegiatan perkarantinaan dibutuhkan dukungan prasarana kerja serta sumber daya manusia yang memadai sehingga pelaksanaan tindak karantina dapat berjalan dengan baik.

Harapan agar penguatan sumber daya manusia, penyediaan saran prasarana dapat terealisasi dalam Rencana Kerja Jangka Pendek 5 tahun (2015 – 2019) sehingga pelaksanaan perkarantinaan di propinsi Papua dapat berjalan optimal.

Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebut satu persatu, semoga Amal Ibadah dapat diterima oleh Allah Yang Maha Kuasa.

Jayapura, 26 Juni 2015

Kepala
Balai Karantina Pertanian kelas I Jayapura.

Drh. L.M. Mastari, MM
Nip. 19620225 199903 1 001